

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu pada kemandirian.

Seperti yang dikemukakan Bachtiar Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Oleh karena itu, sudah saatnya diletakkan suatu landasan yang dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri sebagai pencerminan gotong-royong nasional dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri. Tetapi diperlukan pula usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan devisa, yang berasal dari ekspor, sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan nasional

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat dilihat dari pengertiannya pajak dapat dikategorikan sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar dan

memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun karena terdapat sifat wajib kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya itu, peningkatan pajak dari tahun ke tahun disebabkan kebutuhan belanja negara semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah dibidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kesadaran membayar pajak pada masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kurang. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan pada dasarnya dalam beberapa waktu ini konsumsi masyarakat Indonesia akan barang dan jasa sangat melonjak, sehingga PPN dapat sangat membantu keuangan negara.

Lain halnya dengan pajak yang dibayarkan oleh PKP untuk perolehan atau penyerahan BKP atau JKP. Terdapat reformasi dan modernisasi Kabor Pelayanan Pajak ialah pembaruan sistem pelayanan, agar wajib pajak merasa nyaman dan mudah melakukan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua contohnya ialah wajib pajak dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat Keterangan Bebas merupakan salah satu penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang landasan hukumnya berdasarkan PP No 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau

penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, menjadi PP No 38 Tahun 2003 atas perubahannya. Peraturan tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2001 dan berakhir pada 30 Oktober 2015. Dan peraturan yang digunakan setelahnya ialah PP No 69 Tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu.

Fasilitas yang diberikan Direktur Jendral Pajak terkait pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut hanya dapat digunakan oleh perusahaan atau instansi tertentu, salah satunya ialah PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO). Di dalam peraturan mengenai pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut tertera BKP dan JKP tertentu berhubungan dengan perkereta apian yang dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana peran Surat Keterangan Bebas PPN dan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN bagi PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO). Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, judul dari Tugas Akhir ini adalah **“PENERAPAN PEMBEBASAN PPN DAN PPN TIDAK DIPUNGUT MELALUI FASILITAS SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PPN PADA PT KERETA API (PERSERO) DAOP 4 SEMARANG”**

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir, ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta penguraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang dipilih.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Gambaran umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai
2. Gambaran umum mengenai SKTD dan SKB
3. Penerapan bebas PPN dan PPN tidak dipungut melalui fasilitas SKB dan SKTD pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang
4. Kendala yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan PT. KAI (PERSERO) dalam menggunakan fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam peneletian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian Surat Keterangan Bebas pada PT KAI (PERSERO)
2. Untuk mengetahui proses pemberian Surat Keterangan Tidak Dipungut pada PT KAI (PERSERO)
3. Untuk mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas PPN dan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN
4. Untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama menggunakan fasilitas SKB dan SKTD PPN
5. Untuk mengetahui dampak PT KAI (PERSERO) selama penggunaan fasilitas SKB atau SKTD PPN

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Selain memiliki tujuan, Laporan Tugas Akhir ini juga memiliki kegunaan :

1. Bagi Penulis

- a. Membantu penulis lebih memahami tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan pada perusahaan BUMN.
- b. Guna menambah wawasan penulis untuk mengetahui adanya pemberian fasilitas pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut oleh perusahaan tertentu.
- c. Penulisan ini dilakukan guna syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma III jurusan Perpajakan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

2. Bagi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi ilmiah bagi mahasiswa jurusan perpajakan yang akan meneliti permasalahan yang sama dan menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Diponegoro mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada suatu perusahaan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam Tugas Akhir ini terdapat 2 jenis data, yaitu :

1.4.1. Data Penelitian

Penyajian data dalam Tugas Akhir terdapat 2 bentuk, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Andi Supangat (2010 : 2) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.

Dalam penulisan ini terdapat data primer berupa Faktor Pajak Pertambahan Nilai.

2. Data Sekunder

Menurut Andi Supangat (2010:2) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Dalam penulisan ini terdapat data sekunder berupa Surat Keterangan Bebas dan Surat Keterangan Tidak Dipungut beserta Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan PT Kereta Api Indonesia (persero) Daop 4 Semarang.

1.4.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian pada Tugas Akhir ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab , sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam metode penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Asisten Manager bagian Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

2. Studi Pustaka

Salah satu pengertian Studi pustaka menurut Nyoman Kutha Ratna dalam Prastowo (2012:80) adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin

pernah dibaca di analisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi.

Dalam penulisan ini studi pustaka didapatkan melalui buku yang dimiliki berbagai perpustakaan dan buku yang mencakup mengenai peraturan penggunaan fasilitas Surat Keterangan Tidak Dipungut

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, menggunakan sistematika laporan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam BAB I berisikan tentang latar belakang, ruang lingkup untuk membatasi permasalahan yang akan dijadikan dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Pada BAB II ini berisikan gambaran umum tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan yang diuraikan pada BAB III berisikan tentang pengenaan fasilitas pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut melalui Surat Keterangan Bebas PPN dan Surat Keterangan Tidak Dipungut dan kendala atau masalah yang mungkin terjadi selama pengenaan fasilitas SKB dan SKTD pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV berisikan tentang kesimpulan tentang pengenaan fasilitas pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.